

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Muhammad Arief Rachman Hakim

arifrahmanhakim260@gmail.com

Wahidahwati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aims to examine the influence of human resource capability, leadership support, and application of government accounting standards, teamwork, and utilization of information technology and work facilities on the quality of local government financial statements. This type of research belongs to comparative causal research. The sampling technique used in this research is purposive sampling with the number of respondents as many as 58 people. The data used in this research is primary data obtained from questionnaires distributed directly to the respondents covering the head and staff of accounting / financial administration at the Regional Device Work Unit located in Surabaya City Government. Analysis of data in this study by using multiple linear regression with the help of SPSS 20.0 for windows software to process the questionnaire data. The results showed that the ability of human resources, leadership support, the application of government accounting standards, the use of information technology and work facilities have a positive and significant influence on the quality of local government financial statements. Whereas teamwork has a significant influence but negative or not direct to the quality of government financial statements area.

Keywords: agency theory, local government financial reports, human resources capabilities, SAP implementation, information technology.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kemampuan sumber daya manusia, dukungan pimpinan, penerapan standar akuntansi pemerintahan, kerjasama tim, pemanfaatan teknologi informasi dan fasilitas kerja terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Jenis penelitian ini tergolong penelitian kausal komparatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan didalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 58 orang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarkan langsung kepada responden yang meliputi kepala dan staff bagian akuntansi / penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di Pemerintahan Kota Surabaya. Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS 20.0 for windows untuk mengolah data kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya manusia, dukungan pimpinan, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi dan fasilitas kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Sedangkan kerjasama tim berpengaruh signifikan tetapi berarah negatif atau tidak searah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.

Kata Kunci : *Agency Theory*, laporan keuangan pemerintahan daerah, kemampuan SDM, penerapan SAP, teknologi informasi.

PENDAHULUAN

Dalam pengelolaan keuangan, Pemerintah daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang no 32 tahun 2004 berkewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyampaian laporan keuangan ini dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan yang dimaksud meliputi hal seperti laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, dilampiri juga dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah. Pemerintah daerah juga berkewajiban untuk menyusun dan menyajikan laporan

keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah yaitu: (1) Masyarakat. (2) Wakil rakyat, lembaga pengawasan, dan lembaga pemeriksa. (3) Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, pinjaman. (4) Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 3 ayat 1 menyebutkan Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Untuk mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan, pemerintah membuat Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun sebagai pengganti Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005. SAP digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah memenuhi kriteria atau karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintahan seperti yang disyaratkan pada Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005, berarti pemerintah daerah sanggup mewujudkan transparansi dan akuntabilitas didalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa sebuah opini dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD). Artinya dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan suatu entitas pemerintahan daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan oleh pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak memberi Pendapat (TMP).

Pada kasus aslinya kualitas laporan keuangan pemerintah ternyata masih sangat rendah, di tingkat pusat maupun pemerintahan daerah. Kejadian tersebut bisa dilihat dari masih banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data atau dokumen yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang telah ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah membuat tuntutan kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance government*) meningkat. Hal itu telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Masih sangat rendah kualitas laporan keuangan tersebut disebabkan oleh aparat pemerintah yang resisten terhadap reformasi pengelolaan keuangan negara. Pemikiran untuk korup juga masih kuat di pemerintahan. Kemampuan juga dalam menyusun dan melaporkan keuangan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan juga masih terbatas. Hal ini disebabkan karena SDM yang tidak mempunyai untuk menangani pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah.

Hasil pemeriksaan laporan keuangan yang berupa opini, merupakan cerminan bagi kualitas penyajian dan pengelolaan secara wajar atas suatu laporan keuangan, yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasari oleh kriteria, kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyajian suatu laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dari pengelolaan keuangan yang lebih baik dikarenakan laporan merupakan tanggung jawab suatu entitas.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Choirunisah (2008); Indriasari dan Nahartyo (2008); Widyaningrum dan Rahmawati (2010); Sukmaningrum (2012); dan Vionita (2016), bahwa terdapat tingkat signifikansi yang berbeda dari masing-masing variabel atribut kualitas laporan keuangan, dan masi terbatasnya jumlah penelitian yang dilakukan di Indonesia terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.

TINJAUAN TEORITIS

Agency Theory

Dalam organisasi sektor publik yang menyangkut praktek pelaporan keuangan merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintahan yang bertindak sebagai *principal* dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi,spisial,maupun politik. Dalam suatu pemerintah demokrasi, hubungan antara pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (*agency relationship*). Dalam hai ini pemerintah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai *principal*, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam hubungan keagenan, pemerintah sebagai agen harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan para pengguna informasi keuangan pemerintahan sebagai *principal* (Faristina, 2011)

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu orang lain atau lebih (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* serta memberi wewenang kepada *agent* untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*. Berdasarkan *agency theory*, karateritik utama hubungan keagenan terletak pada kontrak pelimpahan wewenang dan tanggungjawab setiap partisipan (Jensen dan Meckling, 1976).

Telah dijelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan,dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak memberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardismo, 2004)

Dengan demikian staff dan kepala bagian akuntansi keuangan harus mengelolah,menyajikan dan melaporkan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) guna menyelesaikan tanggungjawab sebagaimana semestinya bagian akuntansi keuangan menjalankan tugasnya yakni membuat dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas kepada Pemerintahan Derah Kota Surabaya. Dari penelitian ini peneliti mencoba faktor-faktor apa sajakah yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah Kota Surabaya, dengan cara menggunakan variabel-variabel yang ada seperti Kemampuan Sumber Daya Manusia, Dukungan Pimpinan, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), Kerjasama tim, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Fasilitas Kerja.

Laporan Keuangan Pemerintah

Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk menjalankan fungsinya pemerintah mendapat anggaran untuk mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah dalam suatu periode tertentu. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan

pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Dalam membuat laporan keuangan, pemerintah berpedoman pada karakteristik kualitatif berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 yang meliputi hal-hal sebagai berikut ini: (1) Relevan; Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang terdapat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan adalah informasi yang memiliki karakteristik sebagai berikut ini: (a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat untuk mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. (b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) Informasi akan membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. (c) Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. (d) Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. (2) Andal; Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut ini: (a) Penyajian Jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. (b) Dapat Diverifikasi Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. (c) Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. (3) Dapat Dibandingkan; Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. (4) Dapat Dipahami; Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Kemampuan Sumber Daya Manusia

Faktor yang pertama adalah Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Pengembangan SDM bagi organisasi pada hakekatnya adalah investasi. Investasi dalam pengembangan SDM merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk memperbaiki kapasitas produktif dari manusia, melalui upaya peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan kerja.

Penggunaan Standart Akuntansi Pemerintahan di dalam pengelolaan keuangan daerah menuntut SDM untuk terus mengembangkan keterampilan dan kemampuannya sehingga dapat memanfaatkan pedoman tersebut sebagai alat bantu di dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Pada dasarnya Standart Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman yang dapat dibuat acuan untuk membuat laporan keuangan. Dengan demikian,

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan juga perlu dilakukan oleh pemerintah guna memaksimalkan fungsi Standart Akuntansi Pemerintahan tersebut.

Dukungan Pimpinan

Faktor yang kedua, yakni Dukungan Pimpinan adalah orang yang mempunyai kewenangan untuk memberikan tugas dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain (bawahan) melalui pola hubungan yang baik guna mencapai tujuan perusahaan. Dukungan pimpinan merupakan refleksi sikap positif pimpinan dalam memberikan respon terhadap suatu objek yang dihadapi (Saifuddin, 2011).

Fungsi Dukungan Pimpinan harus mampu membantu organisasi dalam memelihara pengendalian efektif dengan cara memelihara komunikasi yang baik, memberikan dorongan-dorongan positif baik secara moril maupun materiil sehingga merasa aman dan nyaman secara psikologis dalam bekerja yang nantinya akan mendorong peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Susilo (2002) menyatakan bahwa komitmen dan dukungan pimpinan, baik secara moril maupun materiil yang memadai sangat diperlukan. Komitmen mengandung pengertian bahwa pimpinan perlu bersikap konsisten dan konsekuen. Konsisten berarti memberikan dukungan secara terus menerus dan konsekuen berarti bersedia memainkan peran yang diharapkan.

Dari pengertian di atas pimpinan harus memiliki komitmen dalam memberikan dukungan baik moril maupun materiil secara konsisten dan konsekuen di dalam mencapai tujuan organisasi, dalam hal ini menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Faktor yang ketiga yakni Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintahan, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD, SAP dinyatakan dalam bentuk pernyataan Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP), yaitu SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif. Selain itu, SAP juga dilengkapi dengan kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan.

PSAP dapat dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) atau Buletin teknis SAP. IPSAP dan Buletin Teknis SAP disusun dan diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan diberitahukan kepada pemerintah dan badan pemeriksa keuangan (BPK). Rancangan IPSAP disampaikan kepada BPK paling lambat empat belas hari kerja sebelum IPSAP diterbitkan. IPSAP dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari salah tafsir pengguna PSAP. Sedangkan Buletin Teknis SAP dimaksudkan untuk mengatasi masalah teknis akuntansi dengan menjelaskan secara teknis penerapan PSAP atau IPSAP.

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 pasal 5 menjelaskan bahwasanya perubahan PSAP tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Kerjasama Tim

Faktor yang keempat yakni Kerjasama Tim adalah suatu unit yang terdiri atas dua orang atau lebih yang berinteraksi dan mengkoordinasi kerja mereka untuk tujuan tertentu. Definisi di atas memiliki tiga komponen. Pertama dibutuhkan dua orang atau lebih. Kedua, orang-orang di dalam sebuah tim memiliki interaksi regular. Ketiga, orang-orang dalam sebuah tim memiliki tujuan kinerja yang sama (Nazar, 2012). Suatu tim dapat dikatakan efektif jika memiliki kriteria sebagai berikut: memiliki tujuan visi misi yang sama, memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, dan memiliki komunikasi yang efektif.

Dari pengertian diatas bahwasanya kerjasama tim yang dimaksud adalah dalam ruang lingkup bagian akuntansi keuangan pemerintahan daerah memiliki tujuan yang sama yaitu membuat Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah yang berkualitas.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Faktor yang kelima yakni Pemanfaatan Teknologi informasi (TI) dapat didefinisikan sebagai teknologi yang mempunyai kemampuan sedemikian rupa untuk menangkap (*capture*), menyimpan (*store*), mengolah (*process*), mengambil kembali (*retrieve*), menampilkan (*respresent*) dan menyebarkan (*transmit*) informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negri ini (Hamazah, 2009 dalam Vionita, 2016).

Dari pengertian diatas bahwasanya pemanfaatan teknologi yang dimaksud adalah memanfaatkan segala hal yang mengenai teknologi informasi. Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce* dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi guna memperoleh, memproses dan menyimpan informasi yang berkualitas, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Jadi teknologi informasi tersebut mempermudah staff dan kepala bagian akuntansi keuangan untuk menyusun laporan keuangan pemerintahan yang berkualitas,

Fasilitas Kerja

Faktor yang keenam yakni Fasilitas kerja, fasilitas kerja merupakan sarana dan prasarana untuk mendukung para karyawan di dalam menyelesaikan pekerjaannya dan mencapai tujuan organisasi. Moekijat (2001) menyatakan fasilitas adalah suatu sarana fisik yang dapat memproses suatu masukan (*input*) menuju keluaran (*output*) yang diinginkan. Selanjutnya menurut Buchari (2001) fasilitas adalah penyedia perlengkapan- perlengkapan fisik untuk memberikan kemudahan kepada penggunanya, sehingga kebutuhan-kebutuhan dari pengguna fasilitas tersebut dapat terpenuhi. Fasilitas yang disediakan oleh organisasi diyakini mempengaruhi kinerja karyawan.

Dari pengertian diatas bahwasanya fasilitas kerja ini meliputi sarana prasarana dan dan insentif bagi staff guna dapat membuat laporan keuangan pemerintahan daerah yang berkualitas.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.

SDM merupakan human capital di dalam organisasi. Human capital merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan *profesional* dan *economic rent*. *Human capital* merupakan sumber inovasi dan gagasan. Berdasarkan penejelasan diatas, maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H₁: Kemampuan Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Dukungan Pimpinan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.

Menyusunan laporan keuangan merupakan proses yang dilaksanakan secara berkesinambungan selama satu periode atau tahun pelaporan. Hal ini menuntut pimpinan supaya memiliki komitmen dalam mendukung kinerja bawahannya untuk mewujudkan

laporan keuangan yang berkualitas. Komitmen mengandung arti bahwasanya pimpinan perlu bersikap secara konsisten dan konsekuen. Menurut penelitian dari Xu *et al.* (2003) menyatakan bahwasanya dukungan pimpinan manajemen baik manajemen puncak ataupun manajemen menengah mempengaruhi kualitas data yang dihasilkan oleh standar akuntansi pemerintahan. Maka dari itu dukungan pimpinan sangatlah berpengaruh besar terhadap kinerja staff di bagian akuntansi keuangan guna untuk memberikan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah yang lebih baik. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H₂: Dukungan pimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai ketentuan yang berlaku. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan standar yang menjamin laporan keuangan disusun memenuhi kualifikasi informasi keuangan yang berguna bagi pengunanya. Nurlaila (2014) membuktikan dalam penelitian bahwa efektifitas penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Dapat disimpulkan bahwa efektifitas penerapan standar akuntansi pemerintah daerah semakin baik atau semakin besar, maka semakin berkualitaslah laporan keuangan pemerintahan daerah. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hubungan tersebut dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H₃ : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pmerintahan Daerah.

Pengaruh Kerjasama Tim Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.

Choirunisah (2008) menyatakan pembentukan tim khusus pelaksana Sistem Akuntansi Instansi (SAI), pembagian tugas di antara tim, dan kejelasan uraian tugas anggota tim sangat diperlukan agar relevansi informasi laporan keuangan bisa diwujudkan. Anggota dari tim harus mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing yang jelas. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H₄: Kerjasama tim berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Laporan Keuangan Pemerinthan Daerah.

Teknologi informasi menunjukkan bahwa pengolahan data dengan mengnakan teknologi informasi (kompuer/jaringan) akan membeikan banyak manfaat baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, dengan menggunakan atau menmanfaatkan teknologi juga mengurangi kesalahan yang terjadi. Menurut (Jogiyanto, 1995 dalam Harifan, 2009) menejalasakan bahwa informasi yang berkualitas dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Informasi adalah suatu produk dari sistm teknologi informasi yang berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan didalam suatu organisasi termasuk dalam hal pelaporan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H₅ : Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.

Pengaruh Fasilitas Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.

Fasilitas kerja merupakan salah satu faktor yang dianggap mempengaruhi kinerja karyawan. Choirunisah (2008) menguji fasilitas kerja sebagai salah satu faktor yang

mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan. Penggunaan software dalam hal ini Sistem Informasi Akuntansi dalam pengelolaan keuangan tidak terlepas dari kebutuhan akan sarana dan prasarana kerja sehari-hari. Fasilitas kerja seperti lingkungan kerja yang nyaman, ketersediaan insentif dan pemberian alat kantor yang memadai diharapkan dapat memacu kinerja karyawan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H₆: Fasilitas kerja berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Dan Gambaran dari Populasi (obyek) Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yakni penelitian yang menganalisis data dengan bentuk angka yang dipusatkan pada pengujian hipotesis. Penelitian dilakukan melalui studi kausal komparatif. Tipe ini merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, penulis ingin melihat seberapa besar pengaruh dari Kemampuan Sumber Daya Manusia, Dukungan Pemimpin, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kerjasama Tim, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Fasilitas Kerja terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah. Target populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Surabaya dengan jumlah populasi sebanyak 29 SKPD.

Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini mengambil populasi pada Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di Kota Surabaya, jumlah SKPD Kota Surabaya adalah 73 SKPD yang terdiri dari Sekretariat Daerah, 18 Dinas, 17 Lembaga Teknik/Badan/Bagian, inspektorat, RSUD Dr. Mohammad Soewandhie, RSUD Bhakti Dharma Husada, Satuan Polisi Pamong Praja, 31 Kecamatan, Dewan Perwakilan Rakyat, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam pengambilan sampel, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yang berarti bahwa pengambilan berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan penulis. Berikut sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian ini :

Tabel 1
Seleksi Sampel dari Populasi

| Kreteria pengambilan Sampel | Jumlah |
|--|--------|
| Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Surabaya | 73 |
| Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak termasuk Dinas, Inspektorat, Sekretariat Daerah dan Badan | (44) |
| Jumlah Sampel Penelitian | 29 |

Sumber: Data Primer Diolah

Pengambilan sampel di SKPD kota surabaya berjumlah 29 SKPD. Adapun kerreteria pengambilan responden diantaranya:

1. Berdasarkan pertimbangan terkait dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan daerah dilingkungan pemerintahan Kota Surabaya.
 2. Dinas/Badan yang terdaftar dalam www.surabaya.go.id
 3. Kepala Akuntansi dan staf bagian akuntansi / penatausahaan keuangan
 4. Bekerja di lingkungan pemda Kota Surabaya lebih dari lima tahun
- Dari pemilihan tersebut menghasilkan beberapa SKPD yang telah layak untuk dilakukan penelitian yaitu:

Tabel 2
Kreteria Sampel

| No | Keterangan | Jumlah |
|---------------|---|--------|
| 1 | Sekretariat Daerah Kota Surabaya | 1 |
| 2 | Dinas yang berada di bawah SKPD Kota Surabaya | 18 |
| 3 | Lembaga Teknik/Badan/ yang berada di bawah pemerintah Kota Surabaya | 9 |
| 4 | Inspektorat Kota Surabaya | 1 |
| Total Sampel: | | 29 |

Sumber : Data Primer Diolah

Jadi setiap SKPD yang masuk sampel penelitian akan diambil 2 responden, dengan demikian diperoleh 58 responden yakni perkalian antara 29 SKPD \times 2 responden yang diberikan setiap SKPD.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui survei kuisisioner agar diperoleh data yang relevan, dapat dipercaya, obyektif dan dapat dijadikan landasan dalam prosedur analisis, dimana teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan satu set pertanyaan tertulis dan tersusun secara sistematis sehingga pertanyaan yang sama dapat diajukan setiap responden.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yang menjadi sasaran penelitian. Data yang diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuisisioner secara langsung dilakukan selama satu minggu.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi sebab timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2012: 59). Variabel dalam penelitian ini adalah Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), dukungan pimpinan, penerapan Standart Akuntansi Pemerintahan, kerjasama tim, pemanfaatan teknologi informasi, fasilitas kerja.

Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi akibat karena adanya variabel independen (Sugiyono, 2012: 59). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.

Definisi Operasional Variabel

Operasionalisasi variabel adalah suatu cara untuk mengukur suatu konsep dan bagaimana caranya sebuah konsep dapat diukur sehingga terdapat variabel-variabel yang dapat menyebabkan masalah lain dari variabel lain yang situasi dan kondisinya tergantung pada variabel lain (Sugiyono, 2012: 59). Adapun definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut:

Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kemampuan sumber daya manusia adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh setiap orang berupa keterampilan, pengetahuan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam jabatannya guna untuk melaksanakan tugasnya dengan efisien.

Dukungan Pimpinan

Dukungan pimpinan berarti pimpinan melakukan sikap yang dapat merubah karyawan atau bawahannya guna untuk tercapainya suatu visi dan misi perusahaan dan menjadi suatu pusat pemikiran bagi karyawan yang dibawahnya.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam membuat, menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan ini Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan peryaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah (Vionita, 2016)

Kerjasama Tim

Kerjasama tim adalah dua orang atau lebih yang berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama, peran dan tanggung jawab yang jelas, dan memiliki komunikasi yang efektif dan jelas. Setiap anggota tim memiliki peran dan tugasnya masing-masing dan memiliki komunikasi yang cukup sehingga dapat terwujudnya visi dan misi perusahaan, dan anggota tim yang komunikasinya baik akan cepat terwujud.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi (TI) dapat didefinisikan sebagai teknologi yang mempunyai kemampuan sedemikian rupa untuk menangkap (*capture*), Menyimpan (*store*), mengolah (*process*), mengambil kembali (*retrieve*), menampilkan (*represent*) dan menyebarkan (*transmit*) informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat diseluruh wilayah negri ini (Hamzah, 2009 dalam Vionita, 2016).

Fasilitas Kerja

Fasilitas kerja merupakan sarana dan prasarana untuk memudahkan karyawan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya guna untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada periode akuntansi yang digunakan sebagai entitas tersebut. Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang erlu diwujudkan dalam dalam informasi akuntansi.

Analisis Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Bertujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai-nilai variabel independen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Model regresi yang dikembangkan untuk menguji suatu hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

$$KLKPD = \alpha + \beta_1 KSDM + \beta_2 DP + \beta_3 SAP + \beta_4 KT + \beta_5 PTI + \beta_6 FK + \varepsilon$$

Keterangan:

KLKPD : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

α : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$: Koefisien regresi dari variable independen

KSDM : Kemampuan Sumber Daya Manusia

| | |
|-----|-----------------------------------|
| DP | : Dukungan Pemimpin |
| SAP | : Standar Akuntansi Pemerintahan |
| KT | : Kerjasama Tim |
| PTI | : Pemanfaatan Teknologi Informasi |
| FK | : Fasilitas Kerja |
| E | : Koefisien error. |

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model yang berpengaruh secara bersamaan. Adapun Syarat pengujian adalah: (a) Jika nilai signifikan uji $F > 0,05$, maka model yang digunakan dalam penelitian tidak terima dan tidak dapat dipergunakan analisis berikutnya. (b) Jika nilai signifikan uji $F < 0,05$, maka model yang digunakan dalam penelitian diterima dan dapat dipergunakan analisis berikutnya.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya digunakan mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menjelasakan dependen (Ghozali, 2009). Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Jadi semakin tinggi nilai koefisien determinasi (R^2) maka semakin tinggi juga variabel independen dalam menjelasakan variasi perubahan terhadap variabel dependen. Jika nilai R^2 kecil berarti kemampuan variabel independen untuk menjelasakan variabel dependen sangatlah terbatas.

Uji Hipotesis (Uji T)

Uji hipotesis ini pada daarnya mnunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam mnerangkan variabel independen. tingkat kepercayaan yang diperlukan 95% atau taraf signifikan 5% dengan syarat sebagai berikut: (a) Apabila nilai signifikan uji $t < 0,05$ maka H_0 ditolak. (b) Apabila nilai signifikansi uji $t > 0,05$ maka H_0 diterima.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada penelitian ini digunakan sampel pegawai yang menduduki posisi sebagai kepala SKPD dan kepala sub bagian keuangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surabaya dan dipilih berdasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Peneliti memilih Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surabaya sebagai objek penelitian karena sebagai organisasi sektor publik, pemerintah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada pelayanan publik, kepentingan masyarakat, dan mendorong pemerintah untuk tanggap akan lingkungannya. Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) haruslah berjalan dengan baik karena sebagai gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukakan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini didapat dengan cara mengirimkan kuesioner pada 29 SKPD di Kota Surabaya. Jumlah kuesioner yang dikirimkan untuk setiap SKPD sebanyak 2 kuesioner, sehingga total kuesioner yang dikirimkan sebanyak 58 kuesioner. Jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 53 kuesioner, namun kuesioner yang tidak dapat diolah sebanyak 3 kuesioner. Dengan demikian jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 50 kuesioner dengan distribusi sampel sebagai berikut:

Tabel 3
Pengumpulan data

| Umur | Frekuensi | Persentase |
|-------------------------|-----------|------------|
| Kuesioner layak diuji | 50 | 86,2% |
| Kuesioner tidak kembali | 5 | 8,6% |
| Kuesioner cacat/rusak | 3 | 5,2% |
| Total | 58 | 100,0% |

Sumber: Data Primer Diolah

Deskriptif Karakteristik Responden

Karakteristik Responden Menurut Umur

Berdasarkan data yang telah terkumpul dari responden, maka frekuensi jumlah responden di SKPD Kota Surabaya berdasarkan umur dari 50 responden yang menjadi sampel penelitian dapat direkapitulasi seperti dalam tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Umur Responden

| Umur | Frekuensi | Persentase |
|-------------|-----------|------------|
| 25-35 tahun | 25 | 50,0% |
| 36-45 tahun | 15 | 30,0% |
| 46-55 tahun | 10 | 20,0% |
| Total | 50 | 100,0% |

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa jumlah responden yang bekerja di SKPD Kota Surabaya sebagian besar yang berumur 25-35 tahun sebanyak 25 orang dengan presentase 50,0%, sedangkan yang berumur 36-45 tahun sebanyak 15 orang dengan presentase 30,0% dan yang berumur 46-55 tahun sebanyak 10 orang dengan presentase 20,0%.

Karakteristik Responden Menurut Jabatan

Berdasarkan data yang telah terkumpul dari responden, maka frekuensi jumlah responden di SKPD Kota Surabaya berdasarkan jabatan saat ini dari 50 responden yang menjadi sampel penelitian dapat direkapitulasi dalam tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Jabatan Responden

| Jabatan | Frekuensi | Persentase |
|-------------------------|-----------|------------|
| Staff | 26 | 52,0% |
| Kepala Sub Bag Keuangan | 18 | 36,0% |
| Sekretaris | 6 | 12,0% |
| Total | 50 | 100,0% |

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa dari banyaknya responden sebagian besar memiliki jabatan sebagai staff sebanyak 26 orang dengan presentase 52,0%, kemudian Kepala Sub Bag Keuangan sebanyak 18 dengan presentase 36,0% dan sekretaris sebanyak 6 orang dengan presentase 12,0%.

Karakteristik Responden Menurut Pendidikan

Berdasarkan data yang telah terkumpul dari responden, maka frekuensi jumlah responden di SKPD Kota Surabaya berdasarkan pendidikan terakhir dari 50 responden yang menjadi sampel penelitian dapat direkapitulasi seperti dalam tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Pendidikan Responden

| Pendidikan | Frekuensi | Persentase |
|------------|-----------|------------|
| SMA | 3 | 6,0% |
| D3 | 5 | 10,0% |
| S1 | 28 | 56,0% |
| S2 | 14 | 28,0% |
| Total | 50 | 100,0% |

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa jumlah responden yang terbanyak adalah responden yang memiliki ijazah Sarjana (S1) sebanyak 28 orang dengan presentase 56,0%, ijazah Pasca Sarjana (S2) sebanyak 14 orang dengan presentase 28,0%, ijazah Diploma tiga (Diploma) sebanyak 5 orang dengan presentase 10,0% dan responden dengan jenjang pendidikan SMA sebanyak 3 orang dengan presentase 6,0%.

Karakteristik Responden Menurut Masa Kerja

Berdasarkan data yang telah terkumpul dari responden, maka frekuensi jumlah responden di SKPD Kota Surabaya berdasarkan masa kerja dari 50 responden yang menjadi sampel penelitian dapat direkapitulasi seperti dalam tabel 7 berikut ini:

Tabel 7
Masa Kerja

| Masa Kerja | Frekuensi | Persentase |
|------------|-----------|------------|
| 5-10 tahun | 29 | 58,0% |
| > 10 tahun | 21 | 42,0% |
| Total | 50 | 100,0% |

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa dari banyaknya responden sebagian besar menurut masa kerja adalah 5-10 tahun sebanyak 29 orang dengan presentase 58,0% dan masa kerja lebih dari 10 tahun sebanyak 21 orang dengan presentase 42,0%.

Statistik Deskriptif

Tabel 8
Hasil Uji Deskriptif Statistik

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std.Deviation |
|---------|----|---------|---------|-------|---------------|
| KLKPD | 50 | 36 | 48 | 42,50 | 3,125 |
| KSDM | 50 | 27 | 39 | 33,84 | 2,668 |
| DP | 50 | 11 | 15 | 12,96 | 1,212 |
| PSAP | 50 | 28 | 39 | 34,30 | 2,605 |
| KT | 50 | 15 | 20 | 18,58 | 1,341 |
| PTI | 50 | 28 | 39 | 34,70 | 2,894 |
| FK | 50 | 16 | 25 | 21,04 | 2,138 |
| Valid N | 50 | | | | |

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel 8 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah mempunyai nilai rata-rata 42,50. Menunjukkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah yang diambil sebagai sampel adalah baik. Nilai minimum adalah 36 dan nilai maximum adalah 48. Sedangkan nilai standar deviasi adalah 3,125, yakni menjauhi angka 0 sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran data adalah cukup beragam.

Kemampuan Sumber Daya Manusia mempunyai nilai rata-rata 33,84. Menunjukkan bahwa variabel Kemampuan Sumber Daya Manusia yang diambil sebagai sampel adalah baik. Nilai minimum adalah 27 dan nilai maximum adalah 39. Sedangkan nilai standar deviasi adalah 2,668, yakni menjauhi angka 0 sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran data adalah cukup beragam.

Dukungan Pimpinan mempunyai nilai rata-rata 12,96. Menunjukkan bahwa variabel Dukungan Pimpinan yang diambil sebagai sampel adalah baik. Nilai minimum adalah 11 dan nilai maximum adalah 15. Sedangkan nilai standar deviasi adalah 1,212, yakni menjauhi angka 0 sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran data adalah cukup beragam.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai nilai rata-rata 34,30. Menunjukkan bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran yang diambil sebagai sampel adalah baik. Nilai minimum adalah 28 dan nilai maximum adalah 39. Sedangkan nilai standar deviasi adalah 2,605, yakni menjauhi angka 0 sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran data adalah cukup beragam.

Kerjasama Tim mempunyai nilai rata-rata 18,58. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa variabel desentralisasi yang diambil sebagai sampel adalah baik. Nilai minimum adalah 15 dan nilai maximum adalah 20. Sedangkan nilai standar deviasi adalah 1,341, yakni menjauhi angka 0 sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran data adalah cukup beragam.

Pemanfaatan Teknologi Informasi mempunyai nilai rata-rata 34,70. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa variabel desentralisasi yang diambil sebagai sampel adalah baik. Nilai minimum adalah 28 dan nilai maximum adalah 39. Sedangkan nilai standar deviasi adalah 2,894, yakni menjauhi angka 0 sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran data adalah cukup beragam.

Fasilitas Kerja mempunyai nilai rata-rata 21,04. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa variabel desentralisasi yang diambil sebagai sampel adalah baik. Nilai minimum adalah 16 dan nilai maximum adalah 25. Sedangkan nilai standar deviasi adalah 2,138, yakni menjauhi angka 0 sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran data adalah cukup beragam.

Uji Kualitas Data
Uji Validitas

Tabel 9
Hasil Uji Validitas

| Variabel | Item Pernyataan | r hitung | r tabel ($\alpha=5\%$) | Keterangan |
|--|-----------------|----------|--------------------------|------------|
| Kemampuan Sumber Daya Manusia | KSDM1 | 0,529 | 0,2787 | Valid |
| | KSDM2 | 0,393 | 0,2787 | Valid |
| | KSDM3 | 0,657 | 0,2787 | Valid |
| | KSDM4 | 0,470 | 0,2787 | Valid |
| | KSDM5 | 0,542 | 0,2787 | Valid |
| | KSDM6 | 0,516 | 0,2787 | Valid |
| | KSDM7 | 0,492 | 0,2787 | Valid |
| | KSDM8 | 0,525 | 0,2787 | Valid |
| Dukungan Pimpinan | DP1 | 0,750 | 0,2787 | Valid |
| | DP2 | 0,778 | 0,2787 | Valid |
| | DP3 | 0,647 | 0,2787 | Valid |
| Penerapan Standar Standar Akuntansi Pemerintahan | PSAP1 | 0,477 | 0,2787 | Valid |
| | PSAP2 | 0,624 | 0,2787 | Valid |
| | PSAP3 | 0,484 | 0,2787 | Valid |
| | PSAP4 | 0,608 | 0,2787 | Valid |
| | PSAP5 | 0,598 | 0,2787 | Valid |
| | PSAP6 | 0,526 | 0,2787 | Valid |
| | PSAP7 | 0,617 | 0,2787 | Valid |
| | PSAP8 | 0,603 | 0,2787 | Valid |
| Kerjasama Tim | KT1 | 0,760 | 0,2787 | Valid |
| | KT2 | 0,602 | 0,2787 | Valid |
| | KT3 | 0,603 | 0,2787 | Valid |
| | KT4 | 0,579 | 0,2787 | Valid |
| Pemanfaatan Teknologi Informasi | PTI1 | 0,712 | 0,2786 | Valid |
| | PTI2 | 0,721 | 0,2786 | Valid |
| | PTI3 | 0,511 | 0,2786 | Valid |
| | PTI4 | 0,688 | 0,2786 | Valid |
| | PTI5 | 0,583 | 0,2786 | Valid |
| | PTI6 | 0,523 | 0,2786 | Valid |
| | PTI7 | 0,462 | 0,2786 | Valid |
| | PTI8 | 0,733 | 0,2786 | Valid |
| Fasilitas Kerja | FK1 | 0,813 | 0,2786 | Valid |
| | FK2 | 0,363 | 0,2786 | Valid |
| | FK3 | 0,594 | 0,2786 | Valid |
| | FK4 | 0,548 | 0,2786 | Valid |
| | FK5 | 0,813 | 0,2786 | Valid |
| Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah | KLKPD1 | 0,648 | 0,2787 | Valid |
| | KLKPD2 | 0,498 | 0,2787 | Valid |
| | KLKPD3 | 0,602 | 0,2787 | Valid |
| | KLKPD4 | 0,559 | 0,2787 | Valid |
| | KLKPD5 | 0,430 | 0,2787 | Valid |
| | KLKPD6 | 0,448 | 0,2787 | Valid |
| | KLKPD7 | 0,467 | 0,2787 | Valid |
| | KLKPD8 | 0,431 | 0,2787 | Valid |
| | KLKPD9 | 0,470 | 0,2787 | Valid |
| | KLKPD10 | 0,602 | 0,2787 | Valid |

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel 9 dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan item pernyataan dari masing-masing variabel dapat dikatakan valid, karena mempunyai nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($r_{hitung} > 0,2787$).

Uji Reliabilitas

Tabel 10
Hasil Uji Reliabilitas

| Variabel | <i>Cronbach's alpha (a)</i> | Koefisien <i>alpha</i> | Keterangan |
|---|-----------------------------|------------------------|------------|
| Kemampuan Sumber Daya Manusia | 0,601 | 0,60 | Reliabel |
| Dukungan Pimpinan | 0,652 | 0,60 | Reliabel |
| Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan | 0,692 | 0,60 | Reliabel |
| Kerjasama Tim | 0,622 | 0,60 | Reliabel |
| Pemanfaatan Teknologi Informasi | 0,770 | 0,60 | Reliabel |
| Fasilitas Kerja | 0,617 | 0,60 | Reliabel |
| Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah | 0,685 | 0,60 | Reliabel |

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel 10 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai *cronbach's alpha* yang terdapat pada tabel diatas yaitu kemampuan sumber daya manusia sebesar 0,601, dukungan pimpinan sebesar 0,652, penerapan standar akuntansi pemerintahan sebesar 0,692, kerjasama tim 0,622, pemanfaatan teknologi informasi 0,770, fasilitas kerja sebesar 0,617 dan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah 0,685. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa pengukuran data sudah dapat dipercaya (*reliable*).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 11
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smornov Test

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 50 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | 0E-7 |
| | Std. Deviation | ,57557339 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,103 |
| | Positive | ,103 |
| | Negative | -,047 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | ,725 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,669 |

1. Test distribution is Normal

2. Calculated from data

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel 11 hasil uji normalitas data dengan *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar $0,669 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa data tersebut telah terdistribusi normal serta memenuhi asumsi normalitas sehingga layak untuk digunakan dalam penelitian.

Uji multikolinieritas

Tabel 12
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

| Model | Collinearity Statistics | |
|------------|-------------------------|-------|
| | Tolerance | VIF |
| (Constant) | | |
| KSDM | ,211 | 4,750 |
| DP | ,456 | 2,194 |
| PSAP | ,248 | 4,033 |
| KT | ,967 | 1,045 |
| PTI | ,264 | 3,794 |
| FK | ,336 | 2,972 |

a. Dependent Variable: KLKPD

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui nilai *tolerance* (TOL) menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai TOL > 0,10 dan hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai VIF < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa model dapat dikatakan terbebas dari gejala multikolinieritas antar variabel.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 13
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

| Model | | Unstandardized coefficients | | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | | |
| 1 | (Constant) | 3,809 | 1,874 | 2,032 | ,048 |
| | KSDM | ,336 | ,072 | 4,692 | ,000 |
| | DP | ,774 | ,107 | 7,214 | ,000 |
| | PSAP | ,281 | ,068 | 4,148 | ,000 |
| | KT | -,153 | ,067 | -2,291 | ,027 |
| | PTI | ,136 | ,059 | 2,301 | ,026 |
| | FK | ,274 | ,071 | 2,875 | ,000 |

a. Dependent Variable: KLKPD

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel 13, maka prediksi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan daerah dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$KLKPD = 3,809 + 0,336KSDM + 0,774DP + 0,281PSAP - 0,153KT + 0,136PTI + 0,274FK = e$$

Persamaan regresi linier berada diatas dapat dijelaskan bahwa: (1) Nilai koefisien regresi Kemampuan Sumber Daya Manusia (KSDM) adalah 0,336 yang menunjukkan arah hubungan positif (searah) antara kemampuan sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Tanda positif menunjukkan pengaruh kemampuan sumber daya manusia searah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu apabila semakin baik kemampuan sumber daya manusia maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah sebesar 0,336. (2) Nilai koefisien regresi Dukungan Pimpinan (DP) adalah 0,774 yang menunjukkan arah hubungan positif (searah) antara dukungan pimpinan dengan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Hal ini berarti bahwa setiap penambahan dukungan pimpinan maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah sebesar 0,774. (3) Nilai koefisien regresi Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan (PSAP) adalah 0,281 yang menunjukkan arah hubungan positif (searah) antara penerapan standar akuntansi pemerintahan daerah dengan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Tanda positif menunjukkan pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan searah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu apabila semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah sebesar 0,281. (4) Nilai koefisien regresi Kerjasama Tim (KT) adalah -0,153 yang menunjukkan arah hubungan negatif (berlawanan arah) antara kerjasama tim dengan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Hal ini berarti bahwa setiap penambahan kerjasama tim maka akan menurunkan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah sebesar -0,153. (5) Nilai koefisien regresi Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) adalah 0,136 yang menunjukkan arah hubungan positif (searah) antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Hal ini berarti bahwa setiap penambahan dukungan pimpinan maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah sebesar 0,136. (6) Nilai koefisien regresi Fasilitas Kerja (FK) adalah 0,274 yang menunjukkan arah hubungan positif (searah) antara fasilitas Kerja dengan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Tanda positif menunjukkan pengaruh fasilitas kerja searah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu apabila semakin baik fasilitas kerja maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah sebesar 0,274.

Pengujian Hipotesis

Uji F (*goodness of fit*)

Tabel 14
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)
ANOVA^a

| Model | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|--------------|----------------|----|-------------|---------|-------------------|
| 1 Regression | 462,267 | 6 | 77,045 | 204,086 | ,000 ^b |
| Residual | 16,233 | 43 | ,378 | | |
| Total | 478,500 | 49 | | | |

a. Dependent Variable: KLKPD

b. Predictors: (Constant), FK, PSAP, KT, DP, KSDM, PTI

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan pada tabel 14 maka dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung sebesar 204,086 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 ($\alpha=5\%$), maka hasil dari model regresi menunjukkan bahwa ada pengaruh variabel kemampuan sumber daya manusia, dukungan pimpinan, penerapan standar akuntansi pemerintahan, kerjasama tim, pemanfaatan teknologi informasi dan fasilitas kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa model yang dihasilkan baik dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 15
Hasil Uji Determinasi (R^2)

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ,983 ^a | ,966 | ,961 | ,614 |

a. Predictors: (Constant), FK, PSAP, KT, DP, KSDM, PTI

b. Dependent Variable: KLKPD

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan pada tabel 15 dapat dilihat bahwa besarnya koefisien determinasi yang menunjukkan nilai *Adjusted R Square* pada penelitian ini sebesar 0,961 atau 96,1%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel kemampuan sumber daya manusia, dukungan pimpinan, penerapan standar akuntansi pemerintahan, kerjasama tim, pemanfaatan teknologi informasi dan fasilitas kerja menjelaskan variabel kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah adalah sebesar 96,1% sedangkan sisanya 3,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model.

Uji t (T-test)

Tabel 16
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | 3,809 | 1,874 | | 2,032 | ,048 |
| 1 | | | | | |
| KSDM | ,336 | ,072 | ,287 | 4,692 | ,000 |
| DP | ,774 | ,107 | ,300 | 7,214 | ,000 |
| PSAP | ,281 | ,068 | ,234 | 4,148 | ,000 |
| KT | -,153 | ,067 | -,066 | -2,291 | ,027 |
| PTI | ,136 | ,059 | ,126 | 2,301 | ,026 |
| FK | ,274 | ,071 | ,188 | 3,875 | ,000 |

a. Dependent Variable: KLKPD

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan pada tabel 16 menunjukkan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut: (a) Kemampuan sumber daya manusia berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 > 0,05$ dan hipotesis pertama (H_1) diterima. (b) Dukungan pimpinan berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 > 0,05$ dan hipotesis kedua (H_2) diterima. (c) Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan hipotesis ketiga (H_3) diterima. (d) Kerjasama tim tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Variabel kerjasama tim juga menunjukkan t hitung sebesar -0,153 dengan nilai signifikansi sebesar $0,027 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis keempat (H_4) ditolak. (e) Penerapan teknologi informasi berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar $0,026 < 0,05$ dan hipotesis kelima (H_5) diterima. (f) Fasilitas Kerja berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 > 0,05$ dan hipotesis keenam (H_6) diterima.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan melalui beberapa uji yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Kemampuan sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. (2) Dukungan pimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. (3) Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. (4) Kerjasama tim berpengaruh signifikan tetapi berarah negatif atau berlawanan arah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. (5) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan

keuangan pemerintahan daerah. (6) Fasilitas kerja berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang bisa disampaikan peneliti antara lain: (1) Untuk penelitian selanjutnya mempertimbangkan untuk menggunakan objek penelitian yang lebih luas dengan ruang lingkup provinsi. (2) Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan wawancara untuk meningkatkan pemahaman terhadap jawaban responden. (3) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lain yang masih mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah misalnya pengawasan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Buchari, A. 2001. Pengantar Bisnis. *Alfabeta*. Bandung.
- Choirunisah, F. 2008. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan yang Dihasilkan Sistem Akuntansi Instansi. *Tesis*. Maksi Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Faristina. 2011. *Mewujudkan Good Govenance Melayani publik*. Gajah Mada University. Yogyakarta.
- Ghozali, I. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Keempat. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Harifan. 2009. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia. Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Penendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang. Padang.
- Hendro, P. S. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah yang dihasilkan Sistem Informasi Akuntansi (Studi pada Pemerintahan Daerah Si Provinsi Sulawesi Utara). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Indriasari, D., dan E. Nahartyo. 2008. Pengaruh kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kota Palembang Dan Kabupaten Ogan Ilir). *SNA XI*. Pontianak.
- Jensen dan Mecking. 1976. The Theory of The Firm : Manajerial Bechaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial And Ecoomics* 3:305-360.
- Mardismo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Moekijat. 2001. *Pengembangan Manajemen dan Motivasi*. Pionir Jaya. Bandung.
- Nazar, F. 2012. Pengaruh Kerjsama Tim dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan. <https://docs.google.com/document/d/11gKEY0AFDhqsvicQVI53bdbEm4cazeDhgkU39NftiA/mobileBasic>. Diakses tanggal 16 November 2017.
- Nurlaila. 2014. Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten Enrekang). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin Makassar.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Saifuddin, A. 2011. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Edisi Kedua. *Pustaka Belajar*. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif & RND*. *Alfabeta*. Bandung.
- Sukmaningrum, T. 2012. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi informasi Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Kota Semarang). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Susilo, W. 2002. *Audit SDM, Panduan Komperhensif Aditor dan Praktisi Manajemen*. PT. Vorqistatama Bina Mega. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 *Keuangan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 *Pmerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- Vionita, N. E. 2016. Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gersik). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Widyaningrum, C. dan Rahmawati. 2010. Pengaruh SDM dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten). *Symposium Nasional Akuntansi XII Purwokerto*.
- Xu, H. J. H. N., G. D. Nord, dan B. Lin. 2003. Key Issue of Accounting Information Quality Management: Australian Case Studies. *Industrial Management Data System* 103 (7): 461-470.